



## **PENGARUH *BRITISH EXIT* (BREXIT) TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH INGGRIS TERKAIT MASALAH IMIGRAN**

Hardi Alunaza SD <sup>1</sup>, Virginia Sherin <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Tanjungpura;  
email: hardialunaza@gmail.com

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Tanjungpura;  
email: vrgshrtrivedi@gmail.com

### *Abstract*

*This paper aims to explain the influence of British Exit (Brexit) on the UK government's policy on immigrants. The results of the referendum on June 23, 2016, show that more than fifty two percent of Britons choose to leave the EU. The UK's exit from EU membership affects some of the policies of the British government, in particular, the policy on immigrants. However for immigrants, the new policy to be implemented by the British government is considered as a threat. This article uses the theory of policy making and the concept of immigration with qualitative research method in the form of literature study. This paper shows that the impact of Brexit on the UK government's policy on immigrants is the discourse of limiting the number and selection of immigrants that will affect both British and immigrant communities.*

**Keywords:** *Brexit, government policy, immigrants*

### **Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh *British Exit* (Brexit) terhadap kebijakan pemerintah Inggris terkait imigran. Hasil referendum pada 23 Juni 2016 menunjukkan bahwa lebih dari lima puluh dua persen penduduk Inggris memilih untuk keluar dari Uni Eropa. Keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa mempengaruhi beberapa kebijakan pemerintahan Inggris, khususnya kebijakan mengenai imigran. Namun bagi imigran, kebijakan baru yang akan diterapkan oleh pemerintahan Inggris merupakan suatu ancaman. Artikel ini menggunakan teori pengambilan kebijakan dan konsep imigrasi dengan metode penelitian kualitatif dalam bentuk studi kepustakaan. Tulisan ini menunjukkan bahwa pengaruh yang ditimbulkan oleh Brexit terhadap kebijakan pemerintah Inggris terkait imigran adalah adanya wacana pembatasan jumlah dan seleksi imigran yang akan berdampak bagi masyarakat Inggris maupun imigran.

**Kata Kunci:** Brexit, imigran, kebijakan pemerintah

## Pendahuluan

Inggris merupakan salah satu negara yang berada di Eropa bagian Barat. Inggris berbatasan dengan Skotlandia di sebelah Utara dan Wales di sebelah Barat. Selanjutnya Laut Irlandia di sebelah Barat Laut, Laut Keltik di sebelah Barat Daya, dan Laut Utara di bagian Timur, serta Selat Inggris di sebelah Selatan. Selat Inggris merupakan selat yang memisahkan negara Inggris dari dataran Eropa. Inggris adalah sebuah negara kesatuan yang berdiri di bawah sistem monarki konstitusional dan mengadopsi sistem parlementer. Kedudukan pemerintahan pusat berada di ibukota negara Inggris, yaitu London. Inggris, Irlandia Utara, Skotlandia, dan Wales adalah negara-negara yang termasuk dalam kedaulatan Britania Raya.

Setelah Perang Dunia Kedua, masyarakat di kawasan Eropa yang terkena imbas perang, berkeinginan untuk menyatukan kekuatan demi memulihkan kondisi perekonomian Eropa pasca perang (Pusca, 2004). Keinginan tersebut pun diwujudkan dengan terbentuknya *European Coal and Steel Community* (ECSC) yang dibentuk oleh negara Jerman, Italia, Luxemburg, Belanda, dan Belgia. Kemudian, ECSC berganti nama menjadi *European Economic Community* (EEC) pada 25 Maret 1957. Maksud dan tujuan pergantian nama tersebut adalah agar dapat tercipta sebuah pasar bersama, yakni sebuah tahap integrasi yang dilakukan oleh suatu wilayah, di mana arus barang, jasa, modal, serta imigrasi yang bebas dan tidak terdapat hambatan. Komunitas inilah yang kini dikenal dengan nama Uni Eropa (Pusca, 2004).

Pada tahun 1973, terjadi krisis minyak dunia yang mengakibatkan rendahnya pertumbuhan ekonomi di negara Inggris (Sudaryono, 2016). Akibatnya, Inggris berkeinginan untuk bergabung menjadi anggota Uni Eropa dengan tujuan untuk membenahi perekonomian negaranya. Hal yang menjadi daya tarik Inggris untuk bergabung dengan Uni Eropa adalah terdapat kesenjangan pendapatan nasional yang cukup jauh antara Inggris dengan negara-negara anggota Uni Eropa. Dengan bergabungnya Inggris dalam keanggotaan Uni Eropa pada 1 Januari 1973, Inggris berharap perekonomian negaranya dapat meningkat (Cawood, 2004).

Setelah diterima dan bergabung dalam keanggotaan Uni Eropa, Inggris harus melakukan penyesuaian terkait kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam Uni Eropa. Inggris merupakan negara yang aktif dalam berbagai kegiatan kelembagaan, perumusan kebijakan dan pendanaan, serta sebagai penasihat yang seringkali memberikan solusi

terhadap berbagai masalah yang terjadi di Uni Eropa. Inggris juga merupakan salah satu negara dengan pendapatan nasional tertinggi di antara negara-negara anggota Uni Eropa.

Selama menjadi bagian dari Uni Eropa, Inggris juga mendapat berbagai keuntungan, seperti penghapusan hambatan perdagangan, juga kemudahan dalam melakukan ekspor dan impor di kawasan Eropa. Akan tetapi, hal tersebut tidak serta merta mendapat persetujuan dari semua pihak yang berkepentingan di Inggris. Setelah melakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap efektivitas Inggris dalam Uni Eropa, beberapa pihak menyatakan ketidaksetujuannya atas keanggotaan Inggris dalam Uni Eropa. Akibatnya, muncul kelompok-kelompok pro dan kontra terhadap *British Exit* (Brexit) (Sudaryono, 2016: 2). Kedua kelompok inilah yang berperan penting dalam referendum yang diadakan pada 23 Juni 2016, untuk memilih Brexit atau tetap dalam Uni Eropa. Terbentuknya kubu-kubu tersebut, mengindikasikan bahwa terdapat perpecahan pendapat antara kubu pro dan kubu kontra Brexit dalam negara Inggris sendiri.

Sebagai sebuah organisasi regional di Eropa, Uni Eropa dengan peran dominan dari Prancis dan Jerman, telah menjadikannya sebuah organisasi dengan sistem yang bekerja berdasarkan mekanisme supranasional dan antarpemerintahan. Anggota-anggota Uni Eropa selalu menetapkan berbagai kebijakan melalui perundingan dan musyawarah bersama. Salah satu penyebab terkuat dalam masalah ini adalah Belgia yang mengharuskan negara anggota Uni Eropa untuk membantu dalam penanganan imigran dan pengungsi yang telah masuk ke Eropa. Sebagian imigran yang telah berada di Belgia dan Prancis, diberi komando untuk dipindahkan ke Inggris melalui jalur kereta api. Oleh karena kebijakan tersebut telah diputuskan dan menjadi kesepakatan bersama, maka kebijakan tersebut akan mengikat semua pihak yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan tersebut.

Dalam kasus ini, kelompok pendukung Brexit berpendapat bahwa Inggris dapat mengatur perekonomian dan masalah domestiknya sendiri, termasuk masalah imigrasi (Nainggolan, 2016). Pada akhirnya, kelompok-kelompok tersebut berinisiatif untuk mengadakan referendum untuk mengetahui opini masyarakat Inggris terkait keanggotaan Inggris dalam Uni Eropa. Referendum dalam konteks ini, merupakan pilihan langsung pemilih atas pertanyaan yang diajukan berkenaan dengan suatu hal, sebagai dasar keputusan bersama. Namun setiap negara memiliki definisinya masing-masing yang

berdimensi politik dan sosial tersendiri, demikian pula Inggris ketika memberlakukannya pada kasus Brexit pada tahun 2016.

Inggris mengadakan referendum terakhirnya pada 23 Juni 2016 setelah sebelumnya juga pernah mengadakan referendum pada 1975. Hasilnya lima puluh dua persen masyarakat Inggris setuju agar keluar dari keanggotaannya dalam Uni Eropa. Bagi Uni Eropa, hal ini merupakan masalah yang cukup serius (Irwin, 2015). Inggris merupakan entitas yang sangat kuat dalam meningkatkan kejayaan Uni Eropa. Masalah ini cukup substansial mengingat bahwa masyarakat internasional sudah berpandangan bahwa Uni Eropa yang merupakan mitra kerja sama strategis bagi negara-negara maju, perlahan-lahan akan melemah dan tingkat kepercayaan publik terhadap loyalitas Uni Eropa akan menurun. Alasan terbesar masyarakat Inggris untuk mendorong negaranya keluar dari Uni Eropa adalah terkait masalah imigran. Gelombang imigran yang masuk ke Inggris sudah melampaui batas yang seharusnya. Bagi masyarakat Inggris, dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa, masalah imigran akan teratasi (Aya, 2016).

Pasca keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa, pemerintah Inggris di bawah pemerintahan Perdana Menteri Theresa May merevisi kebijakan lama dan membuat kebijakan baru, khususnya terkait masalah imigran. May dan beberapa menteri kabinet, antara lain Boris Johnson, Michael Gove, dan Priti Patel mengatakan bahwa Inggris akan mengadopsi kebijakan yang serupa dengan kebijakan pemerintah Australia tentang imigran dan pencari suaka. Seleksi terhadap imigran yang akan memasuki wilayah Inggris akan dilakukan dan harus melewati berbagai tahap uji jasmani maupun psikis (Aya, 2016).

Kekhawatiran masyarakat akan terjadinya ketidakstabilan kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun budaya akibat adanya imigran, juga menjadi faktor pemicu bagi pemerintah untuk melakukan revitalisasi kebijakan. Masyarakat Inggris khawatir akan berkurangnya lapangan pekerjaan, serta peningkatan tindakan kriminal akibat latar belakang penduduk yang heterogen. Selain dari sisi masyarakat Inggris, para imigran juga merasa bahwa pasca-Brexit, keberadaan mereka akan terancam. Hal ini dibuktikan dari adanya beberapa ujaran kebencian melalui simbol maupun perkataan yang secara langsung maupun tidak langsung mengintimidasi mereka.

Berdasarkan pernyataan di atas, kebijakan Brexit membawa pengaruh yang signifikan bagi negara Inggris, baik bagi sisi pemerintahan, maupun bagi masyarakat

Inggris serta para imigran. Oleh karena itu, artikel ini akan memaparkan isu tersebut menjadi tiga bagian, yaitu: kebijakan pemerintah Inggris pasca-Brexit terkait masalah imigran; pandangan masyarakat Inggris terkait masalah imigran; dan dampak Brexit bagi imigran.

### **Kerangka Pemikiran**

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan teori pengambilan keputusan dan konsep imigrasi. Pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan bergantung pada kondisi internal maupun eksternal suatu negara. Kondisi-kondisi tersebut akan sangat berpengaruh pada pembentukan citra negara yang membuat kebijakan. Terdapat beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam pembuatan kebijakan, seperti kepentingan nasional, sejarah, ekonomi, sosial, serta budaya dan nilai-nilai luhur yang dianut oleh negara tersebut (Afinotan, 2014).

Selain hal tersebut di atas, terdapat aktor-aktor lain yang juga berpengaruh pada proses pembuatan kebijakan. Aktor-aktor tersebut berperan dalam memberikan gambaran mengenai situasi dan kondisi yang diperlukan dalam proses pembuatan kebijakan. Adapun aktor-aktor tersebut antara lain lembaga birokrasi, kelompok kepentingan dari kubu yang berkuasa, maupun media massa. Selanjutnya, pembuat kebijakan akan menentukan tujuan yang ingin dicapai dari adanya kebijakan tersebut, menentukan sektor-sektor strategis, menghitung dan memprediksi *cost and benefit*, serta mengeluarkan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut (Afinotan, 2014)

Pada era globalisasi ini, berbagai isu maupun fenomena yang berasal dari kegiatan lintas batas semakin kompleks dan terkadang menimbulkan keresahan. Salah satunya adalah gerakan-gerakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang melintasi batas nasional, baik secara sukarela maupun terpaksa. Bali menyatakan bahwa terdapat dua fokus utama dalam masalah imigrasi, yaitu peraturan dan kontrol mengenai imigrasi internasional, serta kebijakan terkait masalah minoritas dari imigran. Segala kebijakan, peraturan, dan kontrol mengenai migrasi internasional diserahkan kepada negara-negara penerima imigran berdasarkan keputusan yang diambilnya (White, Little and Smith, 2005).

Sementara Todaro dan Smith (2008: 415) menekankan pada status kewarganegaraan. Seseorang yang tinggal dan menetap di suatu negara (bukan negara

asalnya), tetapi memiliki status warga negara setempat secara legal, bukan termasuk imigran. Kemudian Zlotnik berusaha mengatakan bahwa suatu kelompok yang dikategorikan sebagai imigran, harus menempuh perjalanan yang melintasi batas negara dan juga budaya (Dewi, 2013). Artinya, kebudayaan yang dimiliki imigran pasti berbeda dengan kebudayaan negara yang menjadi tujuannya (tidak serumpun). Hal inilah yang sering kali menimbulkan pertentangan antara penduduk asli dan para imigran. Lebih lanjut lagi, Lee mengemukakan beragam aspek terkait imigrasi, seperti tempat tinggal, tujuan melakukan perpindahan, dan keinginan untuk menetap ataupun tidak di negara yang menjadi tujuan (Dewi, 2013).

Dalam konteks kebijakan, negara penerima imigran berwenang untuk menetapkan arus imigrasi yang masuk maupun warga negara yang meninggalkan wilayah yang menjadi yurisdiksinya berdasarkan otoritas absolut yang dimilikinya (Alunaza, Maulana dan Sudagung, 2018). Hal yang dikhawatirkan negara penerima terkait imigrasi tersebut adalah akan tercipta suatu kondisi yang membuat para imigran merasa adanya ketimpangan baik dari segi kuantitas maupun kualitas hidup mereka. Akibat dari hal ini, arus imigrasi yang masuk ke sebuah negara akan mempengaruhi stabilitas politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam lingkup domestik negara penerima (White, Little and Smith, 2005).

Keberadaan imigran dalam suatu negara mengubah konsep homogenitas dan memunculkan kelompok minoritas baru. Akibat adanya perubahan ini, dasar-dasar kewarganegaraan perlu untuk dikaji ulang karena tidak lagi dapat diukur berdasarkan pada adanya kesamaan latar belakang sejarah, budaya, etnis, maupun agama (White, Little and Smith, 2005). Oleh karena itu, suatu negara perlu membuat perubahan arahan kebijakan mengenai imigran tergantung dengan dinamika politik domestik, regional maupun internasional. Pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan buku, jurnal, artikel ilmiah, serta laporan tahunan dari lembaga atau instansi yang berwenang terkait dengan fenomena yang dikaji oleh penulis. Sumber-sumber tersebut kemudian dianalisa sesuai dengan variabel yang ingin disajikan penulis.

### **Kebijakan Pemerintah Inggris Pasca-Brexit terkait Masalah Imigran**

Inggris telah menjadi anggota Uni Eropa selama lebih dari empat puluh tahun. Hal ini membuat berbagai elemen, seperti pemerintah maupun berbagai lapisan masyarakat

mencoba mengevaluasi kinerja dan manfaat dari bergabungnya Inggris ke dalam Uni Eropa yang ditinjau dari berbagai sektor, seperti ekonomi dan politik. Akibat adanya evaluasi ini, timbul perdebatan dari aktor-aktor yang berasal dari berbagai kalangan, sehingga terbentuklah kubu pendukung Brexit dan kubu pendukung Uni Eropa (Sudaryono, 2016).

Kebijakan Uni Eropa yang sangat mendukung masalah imigrasi, mendorong niat negara Inggris untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Masyarakat Inggris mempunyai sikap toleransi yang rendah terhadap imigran asing yang mempunyai perbedaan latar belakang, seperti perbedaan kultur, agama, maupun bahasa. Sebelum Brexit, Inggris menjadi penerima imigran terbesar kedua setelah Jerman dengan 7,5 juta imigran. Sampai pada tahun 2030, imigran diprediksi akan terus bertambah lebih dari 5,23 juta orang, jika Inggris tidak memutuskan untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa (Nainggolan, 2016)

Sebagai anggota Uni Eropa, Brussels menginginkan adanya pembagian penampungan yang merata atas imigran maupun pengungsi antara negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. Hal inilah yang kemudian membuat Inggris terpaksa menampung para imigran tersebut. Perilaku imigran yang terkadang tidak mengindahkan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah Inggris, serta biaya pendanaan bagi imigran yang terlampau besar, membuat sebagian kalangan elit politik Inggris mengambil kebijakan untuk melakukan referendum pada 23 Juni 2016 (Nainggolan, 2016).

Hal tersebut semakin diperparah ketika Perdana Menteri David Cameron mengundurkan diri dan posisinya digantikan oleh May pada tanggal 13 Juli 2016. Sejak saat itu, May menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris dan sebagai ketua Partai Konservatif di Inggris. May optimis dan mengatakan bahwa Inggris akan tetap berjaya setelah keluar dari keanggotaan Uni Eropa (Sudaryono, 2016). Terkait masalah imigran, May mengambil kebijakan untuk lebih mempertimbangkan hal tersebut dengan baik. Ini dikarenakan permasalahan imigran menyangkut keamanan dan kedaulatan Inggris. Masyarakat Inggris merasa khawatir akan terjadi instabilitas ekonomi dan sosial dalam negeri jika masalah imigran tidak ditangani dengan baik. Mereka juga meminta agar pemerintah menyediakan lapangan kerja yang memadai serta seimbang antara warga negara Inggris dan para imigran, pembenahan infrastruktur dan fasilitas umum negara, serta peningkatan keamanan dalam negeri (Sudaryono, 2016).

May mengatakan bahwa masyarakat Inggris menyetujui keputusan negaranya untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa adalah karena mereka berharap arus imigran yang masuk ke Inggris akan berkurang pasca-Brexit. Salah satu agenda penting yang harus dilaksanakan oleh kabinet Inggris adalah melakukan negosiasi dengan Uni Eropa terkait akses pasar tunggal Inggris. Akses ini diberlakukan dengan tujuan untuk membatasi jumlah warga Uni Eropa yang ingin tinggal dan bekerja di Inggris. Ketiga Menteri Inggris yaitu Johnson, Gove, dan Patel mengatakan bahwa "Jika kita mengimplementasi prinsip-prinsip ini, untuk pertama kalinya dalam generasi akan memungkinkan politikus untuk memenuhi janjinya terkait dengan persoalan imigran" (Aya, 2016). Beberapa aktivis dari kubu pendukung Brexit juga berpendapat sama dengan ketiga menteri tersebut. Mereka mengatakan bahwa semua hak imigran untuk datang, tinggal, dan bekerja di Inggris tidak akan diberikan akses kebebasan seperti sebelumnya. Akan dilakukan seleksi terhadap para imigran dan memastikan semua imigran yang masuk ke Inggris harus memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik.

Kebijakan yang diambil oleh Inggris mengadopsi kebijakan pemerintah Australia pada tahun 1989. Sama seperti di Australia, para imigran yang akan bekerja di Inggris harus memiliki visa kerja dengan berbagai kriteria seperti penilaian pengalaman kerja, kualifikasi kapabilitas individu, dan seleksi usia. Sedangkan bagi imigran yang bertujuan untuk menetap secara permanen, wajib memiliki visa tinggal permanen serta harus lulus tahap uji kesehatan, seperti pindai dada menggunakan sinar-x dan bebas dari virus seperti HIV dan AIDS. Jika imigran mempunyai penyakit Tuberkulosis (TB), tidak diberikan izin untuk menetap secara permanen. Apabila para imigran melakukan tindakan kriminal yang mengancam keselamatan jiwa warga negara Inggris, maka Inggris berwenang untuk mendeportasi imigran tersebut.

### **Pandangan Masyarakat Inggris terkait Masalah Imigran**

Masyarakat Inggris memiliki pandangan tersendiri terkait kebijakan yang diterapkan oleh Uni Eropa mengenai masalah imigran. Uni Eropa mempunyai regulasi yang tentunya mengikat para anggotanya untuk mematuhi segala kebijakan yang diputuskan. Hal inilah yang kemudian menimbulkan keresahan bagi masyarakat Inggris dan pada akhirnya menyetujui referendum untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Imigrasi adalah salah satu faktor yang patut diperhitungkan oleh Inggris dalam hal kebijakan fiskal dan

moneter, terdapat pengaruh positif yang dapat dirasakan secara langsung, seperti pendapatan negara yang diperoleh dari pemungutan pajak atau retribusi dari para imigran (Irwin, 2015).

Namun, dengan adanya imigran yang datang ke Inggris, secara langsung maupun tidak langsung dapat mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat Inggris. Meskipun Inggris merupakan negara dengan perindustrian modern terbesar di Eropa, masuknya tenaga kerja yang berasal dari kalangan imigran dapat menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat Inggris sendiri (Sudaryono, 2016). Masyarakat Inggris berpandangan bahwa dengan adanya arus imigrasi besar yang memasuki Inggris, stabilitas keamanan dalam negeri Inggris akan terganggu. Hal ini dapat dikatakan sebagai ancaman terhadap keamanan sosial dan ekonomi dari masyarakat penerima (Dewi and Sudagung, 2017).

Seiring dengan bertambahnya jumlah imigran yang masuk ke Inggris, maka tingkat kriminalitas juga akan meningkat. Masyarakat Inggris percaya bahwa permasalahan imigran harus ditangani secara serius oleh pemerintah Inggris pasca-Brexit. Keputusan pemerintah Inggris untuk keluar dari Uni Eropa juga dinilai sangat efektif dalam mereduksi jumlah kuantitas imigran yang masuk ke Inggris. Masyarakat merasa akan lebih efektif apabila Inggris keluar dari keanggotaannya dalam Uni Eropa apabila dibandingkan dengan pemerintah yang harus membuat sistem dan kebijakan baru terkait imigran (Aya, 2016). Berdasarkan hasil yang didapat oleh salah satu lembaga survei di Inggris pada tahun 2016 adalah masyarakat merasakan adanya dampak negatif yang lebih besar dibandingkan manfaat positif yang diperoleh dari adanya arus imigrasi yang masuk ke Inggris. Sebanyak 64% masyarakat Inggris percaya bahwa jaminan atas hak warga negara untuk hidup dan bekerja akan cenderung menurun dengan kehadiran imigran di negara Inggris (Sudaryono, 2016).

### **Dampak Brexit bagi Imigran**

Keluarinya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa membawa dampak buruk bagi para imigran yang bekerja dan menetap di Inggris. Terdapat oknum-oknum yang melancarkan aksi rasisme bagi para imigran yang menjadi minoritas di Inggris. Imigran Polandia merasakan dampak yang paling signifikan. Mereka diteror dengan menggunakan lambang atau simbol-simbol yang berbau rasisme, seperti brosur serta selebaran yang

berisi tentang ujaran kebencian terhadap imigran yang ditulis dalam bahasa Inggris dan Polandia. Brosur tersebut berisi agar masyarakat Polandia yang tinggal di Inggris segera meninggalkan negara itu. Brosur dan selebaran ditempelkan pada mobil-mobil yang terparkir di pinggiran jalan daerah Cambridgeshire<sup>1</sup>.

Kantor Asosiasi Budaya dan Sosial Polandia di Hammersmith, dirusak dan ditempleli dengan slogan yang berbau rasisme. Selain itu, kelompok anti-imigran juga memberhentikan orang-orang yang melewati jalan raya di sekitar Huntingdon dan mengatakan bahwa “kami memilih keluar, jadi sudah saatnya semua imigran keluar dari negara ini”. Akibatnya, suasana jalan di kota-kota di Inggris menjadi tidak kondusif pasca referendum. Tentunya hal ini sangat meresahkan masyarakat maupun imigran. Mereka akan merasa terganggu oleh ujaran langsung maupun tidak langsung dari kelompok anti-imigran tersebut. Masyarakat yang pro-imigran mengatakan bahwa isu imigran merupakan isu yang paling mempengaruhi keputusan referendum pada 23 Juni 2016. Menurut mereka, para pegiat kampanye pendukung Brexit telah menyebarkan berita bohong yang menjatuhkan citra para imigran agar masyarakat mendukung referendum Inggris untuk keluar dari Uni Eropa (Sari, 2016).

Selain brosur dan selebaran yang ditempel pada kendaraan, insiden rasisme yang lainnya juga terjadi di Inggris. Hardoko (2016) menuliskan bahwa terdapat mural di pinggir jalan-jalan utama, serta kartu-kartu yang bertuliskan “Tak ada lagi kutu Polandia”. Kartu-kartu tersebut sengaja dikirim oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ke rumah-rumah imigran asal Polandia. Bagi pendukung Brexit, jumlah imigran yang besar membuat mereka setuju agar Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Mereka berpendapat bahwa arus imigran dapat dibendung jika Inggris keluar dari Uni Eropa karena tak akan terikat prinsip pergerakan manusia secara bebas sebagaimana ditetapkan oleh Uni Eropa.

Selain aksi rasisme dalam bentuk penyebaran brosur yang bersifat provokatif, terdapat aksi-aksi lain seperti yang terjadi di Southampton, Inggris. Umat muslim yang tinggal di Southampton akan mengadakan Shalat Ied berjamaah. Akan tetapi, Shalat Ied berjamaah yang akan diadakan di sebuah taman tersebut, terpaksa ditiadakan. Umat muslim khawatir akan aksi demo yang dilakukan oleh kelompok anti-imigran. Selain

---

<sup>1</sup>National Geographic. (2016). *Brexit Picu Aksi Rasisme di Inggris*. Diambil 10 Februari 2018 dari <http://nationalgeographic.grid.idberita/2016/06/brexit-picu-aksi-rasisme-di-inggris>

demo anti-imigran “Imigran Tidak Diterima” tersebut, terdapat pula aksi demo yang dilakukan oleh kelompok *Southampton Antifasis*. Akibat adanya aksi demo yang dilakukan oleh dua kubu yang bertentangan inilah, yang membuat umat muslim di Southampton khawatir jika tetap melaksanakan Shalat Ied saat Idul Fitri tahun 2016 lalu (Sari, 2016). Akan tetapi, pasca-Brexit tidak semua imigran yang merasa khawatir dengan kondisi dalam negeri Inggris. Salah satu warga negara Indonesia yang menetap di kota London, Zukni, yang memiliki usaha layanan angkutan kendaraan mewah, belum merasakan ataupun menyaksikan insiden rasisme seperti yang diberitakan (Hardoko, 2016).

### **Pengaruh Brexit terhadap Kebijakan Pemerintah Inggris terkait Imigran**

Berdasarkan penjelasan di atas, keanggotaan Inggris dalam Uni Eropa dinilai tidak efektif. Bagi masyarakat, sejak Inggris bergabung dengan Uni Eropa, tidak ada pengaruh yang terlalu signifikan, terutama dalam hal pengambilan keputusan terkait masalah imigran. Sejak awal tahun 2016, Inggris mulai mengeluarkan isu-isu terkait Brexit. Hal ini tentunya memunculkan berbagai spekulasi, baik dari masyarakat domestik Inggris, maupun masyarakat internasional. Saat itu, keuangan Uni Eropa tengah merosot karena krisis yang menimpa Yunani. Sebelum Brexit, Inggris berada di bawah pimpinan Perdana Menteri David Cameron. Cameron mendapat tuntutan dari masyarakat Inggris untuk mengatasi masalah imigran dan merevisi kebijakan Inggris. Saat itu, Inggris masih merupakan bagian dari Uni Eropa. Oleh karena itu, Inggris harus tunduk pada semua kebijakan Uni Eropa terkait masalah imigran.

Dalam kebijakan yang diterapkan Uni Eropa, imigran berhak mendapat kesempatan yang sama dengan masyarakat di negara penerima, baik dalam hal akses pekerjaan, fasilitas umum milik negara penerima, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal. Hal ini lantas menimbulkan kecemburuan sosial tersendiri bagi masyarakat Inggris. Akibatnya, pada 23 Juni 2016, kelompok-kelompok pendukung Brexit mengadakan referendum agar masyarakat Inggris dapat memilih apakah Inggris tetap berada dalam Uni Eropa atau keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Hasilnya, sebagian besar masyarakat Inggris memilih Brexit. Setelah itu, pada 13 Juli 2016, Perdana Menteri David Cameron mengundurkan diri dan posisinya digantikan oleh May (Sudaryono, 2016: 60).

Sebagai seorang perdana menteri, May memiliki beberapa tugas penting seperti membentuk kabinet baru. Kabinetnya bertugas untuk menyusun berbagai kebijakan, khususnya terkait masalah imigran dan melakukan berbagai perundingan setelah Inggris resmi keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Dengan dipimpinnya Inggris oleh May memungkinkan terbentuknya kebijakan terkait imigran yang pro-masyarakat Inggris. Dalam proses pengambilan kebijakan terdapat faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi. Dalam kasus Brexit ini, faktor eksternalnya adalah para imigran yang berasal dari negara-negara kawasan Eropa dan faktor internalnya adalah kondisi yang tercipta dalam lingkup domestik Inggris, yang berasal dari aspirasi masyarakat terkait tuntutan mengenai masalah imigrasi (Afinotan, 2014).

Meningkatnya jumlah imigran yang masuk ke negara Inggris, memunculkan urgensi tersendiri di kalangan pemerintah maupun masyarakat Inggris. Hal ini lah yang membuat May sebagai seorang Perdana Menteri, berwenang untuk membentuk sebuah kebijakan mengenai penanganan imigran internasional yang masuk ke negaranya. May dan menteri kabinetnya akan mengadopsi kebijakan yang sama dengan kebijakan pemerintah Australia terkait imigran dan pencari suaka yang dianggap sudah berhasil dalam menangani masalah serupa. Dengan mengadopsi kebijakan tersebut, diharapkan kontrol terhadap arus imigrasi akan semakin ketat dan pembatasan terhadap jumlah imigran semakin jelas.

Selanjutnya, terdapat faktor-faktor lain seperti tingkah laku, doktrin, ideologi, nilai, dan analogi yang dimiliki oleh negara pembuat kebijakan juga akan berpengaruh pada kebijakan yang akan diambilnya (Afinotan, 2014). May merupakan figur yang berperan penting dalam kebijakan yang ditetapkan oleh Inggris terkait masalah imigran. Faktor citra yang dimiliki May juga mempengaruhi terbentuknya kebijakan yang pro-masyarakat Inggris karena ia percaya bahwa imigran tidak memberikan dampak positif yang signifikan bagi Inggris dan akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat Inggris karena persaingan dalam hal ekonomi maupun sosial akan lebih ketat.

Ditinjau dari sisi masyarakat Inggris, mereka merasa resah dengan keberadaan imigran yang banyak di negara mereka. Bagi mereka, semakin bertambahnya jumlah imigran, semakin besar pula kemungkinan terjadinya kriminalitas dan ketidakstabilan kondisi ekonomi, politik, dan sosial di Inggris. Oleh karena itu, bagi pendukung Brexit, keputusan Inggris untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa merupakan hal yang paling

tepat. Dengan pembatasan jumlah imigran, serta seleksi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap imigran, maka masyarakat Inggris dapat merasakan kembali hak-hak mereka sebagai warga negara Inggris, setelah sebelumnya tidak dapat merasakan hal tersebut karena terhalang oleh pembagian akses dengan imigran. Sebenarnya, tindakan masyarakat Inggris yang pro-Brexit merupakan tindakan untuk menjaga keamanan nasional mereka. Ini tentunya sah-sah saja untuk dilakukan mengingat masyarakat Inggris takut akan tergerusnya identitas nasional, ideologi, maupun paham-paham dan nilai yang telah mereka anut dari zaman dahulu.

Ditinjau dari sisi imigran, Brexit merupakan sebuah ancaman yang sangat serius. Hal ini karena kebijakan yang diterapkan pemerintah Inggris akan sangat menyudutkan imigran. Mereka juga merasakan bahwa terdapat berbagai bentuk ancaman yang dilakukan oleh oknum-oknum, seperti ujaran kebencian melalui simbol dan perkataan melalui brosur, selebaran, atau kartu-kartu yang sengaja ditujukan ke kawasan perumahan imigran, serta mural-mural yang digambar di tembok. Berbagai ujaran kebencian itu secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan perasaan takut dan khawatir yang dirasakan oleh para imigran. Akan tetapi, tidak sedikit masyarakat Inggris yang menyesali tindakan rasisme tersebut. Terlebih lagi, Inggris merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Bagaimanapun, imigran merupakan entitas yang harus dijamin hak asasinya.

### **Simpulan**

Inggris pada dasarnya merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi dan pengakuan terhadap hak asasi manusia. Keputusan masyarakat Inggris melalui referendum untuk mendorong negaranya keluar dari anggota Uni Eropa merupakan salah satu implementasi dari nilai-nilai demokrasi, di mana rakyat berhak untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan domestik maupun internasional. Dengan dilantikannya May sebagai Perdana Menteri baru, kabinet Inggris mengatur kebijakan baru terkait masalah imigran. Sebelumnya, Inggris terikat dengan kebijakan yang diterapkan oleh Uni Eropa terkait imigran. Namun, pasca-Brexit, Inggris berhak merumuskan kebijakannya sendiri. Akibat kebijakan baru yang dirumuskan oleh pemerintah Inggris pasca-Brexit, imigran yang bekerja dan menetap di Inggris merasa resah. Pasalnya, mereka khawatir akan terjadi aksi-aksi yang rasisme yang akan mengancam keselamatan mereka. Mereka juga

takut akan dideportasi ke daerah asal mereka dan tidak diizinkan untuk masuk ke negara Inggris lagi.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan baru yang dirumuskan oleh pemerintah Inggris pasca-Brexit menimbulkan pengaruh yang cukup signifikan, berupa wacana pembatasan jumlah dan seleksi imigran. Bagi masyarakat Inggris, kebijakan tersebut tentunya akan membawa dampak yang cukup positif. Akan tetapi, bagi imigran, kebijakan baru tersebut akan membawa dampak negatif yang sangat meresahkan. Terlepas dari kebijakan tersebut, Inggris merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Bagaimanapun juga, masyarakat Inggris dan juga imigran merupakan entitas yang harus dijunjung hak asasinya.

### Daftar Pustaka

- Afinotan, L. A. (2014) 'Decision-Making on International Relations: A Theoretical Analysis', *Canadian Social Science*, 10(5), pp. 249–256. doi: 10.3968/%x.
- Alunaza, H., Maulana, I. & Sudagung, A. D. (2018) 'The Pacific Solution as Australia Policy towards Asylum Seeker and Irregular Maritime Arrivals (IMAs) in John Howard Era', *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 14(1), pp. 61–76. Diambil 16 Mei 2018, dari <http://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasiona/article/view/2789/2479>.
- Aya (2016) *Brexit Jalan Keluar Atasi Gelombang Imigran*. Diambil 16 Mei 2018, dari <http://www.mediaindonesia.com/read/detail/49233-brexit-jalan-keluar-atasi-gelombang-imigran>.
- Cawood, I. (2004) *Britain in the Twentieth Century*. Routledge.
- Dewi, A. U. & Sudagung, A. D. (2017) 'Indonesia's Migrant Domestic Workers within ASEAN Community Framework', *Intermestic: Journal of International Studies*, 2(1), p. 20. doi: 10.24198/intermestic.v2n1.3.
- Dewi, E. (2013) 'Migrasi Internasional dan Politik Luar Negeri Indonesia', *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 9(1). doi: 10.26593/jihi.v9i1.535.%p.
- Hardoko, E. (2016) *Inggris Keluar dari Uni Eropa, Imigran Mulai Tak Nyaman - Kompas.com*. Diambil 16 Mei 2018, dari <https://internasional.kompas.com/read/2016/06/28/10393851/inggris.keluar.dari.uni.eropa.imigran.mulai.tak.nyaman>.
- Irwin, G. (2015) 'BREXIT: the impact on the UK and the EU', *Global Council*, (June), p. 43.
- Poltak Partogi Nainggolan (2016) "'Brexit', Penyebab Dan Implikasi Globalnya', *Info Singkat*, VIII(12), pp. 5–8.

- Pusca, A. (2004) *European Union : challenges and promises of a new enlargement*. International Debate Education Association. Diambil 16 Mei 2018, dari [https://books.google.co.id/books/about/European\\_Union.html?id=VirUehtGzVkC&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/European_Union.html?id=VirUehtGzVkC&redir_esc=y).
- Sari, A. P. (2016) *Usai Brexit, Serangan Rasisme Meningkat di Inggris*. Diambil 16 Mei 2018, dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160628100222-134-141468/usai-brexit-serangan-rasisme-meningkat-di-inggris>).
- Sudaryono, P. A. (2016) 'Alasan Inggris Keluar dari Keanggotaan Uni Eropa Tahun 2016.'
- Todaro, M. P. & Smith, M. P. (2008) 'Pembangunan ekonomi jilid 1 / Michael P. Todaro, Stephen C. Smith', 1. *EKONOMI PEMBANGUNAN, Pembangunan ekonomi jilid 1 / Michael P. Todaro, Stephen C. Smith*. Universitas Negeri Malang, 2008(2008), pp. 1–99. doi: 2008.
- White, B., Little, R. & Smith, M. (2005) *Issues in world politics*. Palgrave Macmillan.